

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMIKIRAN POLITIK
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

ANDI FIRNANDO

NPM: 1621020348

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMIKIRAN POLITIK
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syar'iyah**

Oleh

ANDI FIRNANDO

NPM : 1621020348

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr.Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr.Agus Hermanto, MHI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemikiran politik oleh Partai Solidaritas Indonesia yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan analisis, Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia dan Bagaimanakah cara Partai Solidaritas Indonesia memimpin anggotanya yang beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia yang belum sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka baik literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, PSI adalah partai yang sangat kompeten dan instruktif dan terbuka untuk semua kalangan agama. Menurut PSI, agama adalah keragaman yang dapat disatukan karena agama dapat digunakan sebagai dorongan untuk memperkuat ikatan solidaritas nasional, namun PSI dianggap belum selektif jika menyandang nama agama, misalnya menolak perda agama dan menolak poligami. PSI memiliki pemimpin yang bukan muslim menjadi masalah dalam kalangan umat Islam, karena mereka mungkin menetapkan aturan baru yang dapat membahayakan umat Islam sendiri, pemikiran non muslim jelas berbeda dengan pemikiran umat Islam. Hal ini dibuktikan ketika PSI menolak perda agama, padahal apabila perda tersebut tidak bersifat diskriminatif maka tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Terkait poligami, bahwa ajaran islam juga menganjurkan untuk memiliki 1 orang Istri saja, namun bila tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri maka suami diperbolehkan untuk melakukan poligami. Selanjutnya mengenai ucapan selamat natal ini memiliki dua versi, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Sebagai Negara demokrasi tidak seharusnya PSI mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyetarakan suara terhadap ucapan selamat natal ini.

PERNYATAAN KEASLIAN / ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Firnando

NPM : 1621020348

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, **Tinjauan Hukum Islam mengenai Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Bandar Lampung, Januari 2020

Andi Firnando

NPM 1621020348



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PEMIKIRAN POLITIK PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA**
Nama : Andi Firnando
NPM : 1621020348
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Pembimbing I

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, MHI

NIP. -

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iiyyah**

Frenki, M.Si

NIP. 198003122009011017

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia” disusun oleh, Andi Firnando, NPM. : 1621020348, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa 30 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr.Hj.Erina Pane S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Dr.Agus Hermanto, MHI (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.196210221993031002

MOTTO

أَسْتَحْذَرُ الشَّيْطَانَ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

“Syaitan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah, mereka itulah partai syaitan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaitan itulah golongan yang rugi”.

(Q.S al-Mujadalah (58) :19)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrokhim

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Saya persembahkan sebuah karya tulis ini sebagai salah satu wujud dari rasa cinta dan kasihku kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Ersah dan Ibu Nur Aisah yang telah dan akan mengasihi dan menyayangiku dengan penuh ketulusan. Terimakasih atas kepercayaan dan cinta kasih yang kau wujudkan dalam pengorbananmu selama ini. Semoga karya ini, dapat menjadi sebab tangis harumu atas pencapaian anakmu. *Jazakamullah khairan katsir*.
2. Kakakku Lisa Susanti, yang telah menyayangiku dengan caranya sendiri. Terimakasih atas perhatian, cinta kasih, dan motivasinya.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Andi Firnando dilahirkan di Mesuji pada 27 Februari 1998 dari rahim seorang ibu bernama Nur Aisah dan ayah Ersah. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Sebelum melanjutkan studi di UIN Raden Intan Lampung penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Mukti Karya lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMPN 01 Simpang Pematang lulus pada tahun 2013, dan pada tahun 2016 tamat dari SMAN 01 Simpang Pematang.

Semasa studi, penulis pernah aktif di beberapa organisasi maupun komunitas antara lain: UKM Bapinda, UKM Resimen Mahasiswa, UKMF Gemais, UKMF Mourt Court Community, dan Himpunan Mahasiswa Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam mengenai Pemikiran Politik Partai Soidaritas Indonesia** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr.Hj.Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Agus Hermanto,MHI selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan ibu dosen serta *staff* program studi siyasah syar'iyah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Guru/Dosen/Ustadz/Murabbi terbaikku sejak duduk di bangku SD sampai dengan S1. Terimakasih atas pengajaran dan didikanmu. Karena jasa-jasamulah saya sampai pada titik ini. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan hidup.
7. Untuk kakakku tercinta Lisa Susanti yang selalu memberikan semangat dan senyum kebahagiaan.
8. Ahmad Kholili S.E selaku motivator yang selalu memberikan arahan dan semangat.
9. Teman-teman KKN kelompok 90, Yogi Mandala Saputra, Muhammad Nando Wahid, Rakha Ramadhan, Sella Indah Juwita, Agustina Nurhayati, Gishella Febionika, Neneng Puspitasari, Rury Mauliana, Gesca Fentika, Aumia Roza, Gita Nurjanah, Ayu Irma Fitriani dan Fitri Astuti.
10. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara H dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 16
11. Untuk Sahabat terbaik, Achmad Barkah, Ipan Rolindo dan Sidik Pratama Aji terimakasih sudah mengisi kekosongan hati dan selalu memberikan motivasi dan semangat disaat jenuh mengerjakan skripsi.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat member manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis

Andi Firnando
NPM. 1621020348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARTAI

POLITIK

A. Hukum Islam	19
1. Pengertian Hukum Islam	19
2. Sumber Hukum Islam.....	20
3. Pandangan Hukum Islam terhadap partai politik menurut Al-quran dan sunnah	27
4. Pandangan Hukum Islam terhadap pemikiran partai politik menurut Ijtihad ulama	33
B. PartaiPolitik.....	36
1. Pengertian Partai Politik.....	36
2. Tujuan Partai Politik.....	37
3. Kegunaan PartaiPolitik.....	39
C. Bentuk pemikiran anggota partai politik	45
D. Kajian Penelitian Terdahulu	46

BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI SOLIDARITAS

INDONESIA

A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia.....	50
B. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia.....	51
C. Filosofi Lambang Partai Solidaritas Indonesia	51
D. Prinsip Politik Partai Solidaritas Indonesia.....	53
E. Strategi Politik PSI KepadaUmat Islam di Indonesia	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemikiran Politik PSI dalam Hukum Islam	60
B. Cara PSI memimpin anggotanya yang beragama Islam	61
1. PSI dipimpin oleh pemimpin kafir	61
2. PSI menolak poligami	65
3. PSI memaksa mengucapkan selamat natal	73
4. PSI menolak perda agama	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Rani Dwi Yulianti	46
2. Penelitian Dara Atika	47

DAFTAR GAMBAR

1. Logo PSI.....	52
2. Agama Grace Natalie	57
3. PSI menolak poligami.....	58
4. Memaksa mengucapkan selamat natal	59
5. Perda Agama	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan sangat diperlukan terhadap istilah dan judul dalam setiap penelitian, hal ini dilakukan supaya peneliti dapat meminimalkan kekeliruan serta kesalahan terhadap judul skripsi yang ditulis. Adapun judul skripsi ini ialah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia” yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu mengamati, melihat-lihat, serta menengok sesuatu dari tempat tinggi ataupun jauh dan memeriksanya¹
2. Hukum Islam yaitu sistem dan ajaran yang dituliskan di dalam kitab Allah al-Qur'an sebagai ajaran agama, adapun istilah hukum Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan sifat, konsep, maupun fungsi yang tertera pada hukum biasa. Agamapun sangat berbeda dengan hukum biasa karena agama manyangkut suasana hati, jiwa serta keadaan spiritual yang derajatnya lebih tinggi. Mengenai kedudukan hukum biasa, bahwa hukum biasa hanya membahas persoalan dunia semata²
3. Pemikiran Politik PSI adalah strategi dan rencana sistematis yang dimiliki Partai tersebut. Setiap Partai Politik mempunyai rencana untuk

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

²Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991), h.7.

diimplementasikan dalam kegiatan Partai Politik agar dapat mencapai tujuannya yaitu memenangkan setiap momentum perebutan kekuasaan.³

Berdasarkan kriteria penelitian ilmiah dalam uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah meninjau pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia ketika membina kader, pengurus, maupun legislatif muslimnya dalam perspektif Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Secara subyektif dan obyektif, peneliti memilih judul yang dimaksudkan di atas karena alasan sebagai berikut:

1. Secara Objektif

PSI beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi. Kebijakan itu antara lain, menolak perda syari'ah atau perda yang berlandaskan agama hingga yang terakhir soal instruksi soal ucapan selamat Natal.

Kontroversi kebijakan PSI bermula dari pernyataan ketua PSI, Grace Natalie yang tidak mendukung perda syari'ah dan perda yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik. Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarka Grace saat HUT ke-4 PSI. Grace

³Firmanzah, *Marketing Politik "Antara Pemahaman dan Realitas"* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.80.

mulanya berbicara tentang partainya yang akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi. Tak berhenti sampai disitu, PSI kembali mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi yakni politik anti poligami. Grace melarang sluruh kader PSI untuk berpoligami. Praktik poligami disebutkan merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan. Tekad penolakan poligami itu juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.⁴

PSI adalah partai yang lebih menargetkan partisipan dari kalangan anak muda, kalangan perempuan dan lintas agama sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis Pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Subjektif

Peneliti sangat yakin bahwasanya skripsi ini bisa dituntaskan dengan benar dan baik. Semuanya diyakinkan karena penulis mendapat cukup banyak data dari berbagai sumber yang dibutuhkan sebagai referensi, dan yang penulis tahu, belum ada satu penelitipun yang membahas pokok tentang pemikiran PSI ini, adapun yang pernah penulis teliti bahwa skripsi sebelumnya hanya membahas strategi politik dan penjelasan partai secara umum, sehingga penulis tertarik

⁴ <https://m.detik.com/news/berita/d-4358624/sikap-psi-yang-kontroversi-tolak-perda-agama-instruksi-ucapan-natal> diunduh pada tanggal 11 agustus 2020 pukul 06:38

untuk mengangkat judul ini karena pokok bahasannya sesuai dengan apa yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Pada aslinya Negara memiliki wilayah dalam ranah politik, karena teori politik membahas tentang Negara sebagai lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, jadi Negara adalah sesuatu yang tidak diam, Negara dapat bergerak. Selain itu pula, politik dapat menyelidiki gagasan, asal mula dibentuknya negara, asas-asas, hakikat negara, serta tujuan dan bentuk suatu negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok elit, pendapat umum, peranan parpol, dan keberadaan pemilu.⁵

Adapun sistem politik di Indonesia yaitu rangkaian pengaruh timbal balik yang diabstrakkan dari keseluruhan perilaku sosial melewati beberapa nilai yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat di Indonesia. Sesuai penjelasan yang dimaksudkan itu, disebut bahwa lingkungan intra masyarakat akan mempengaruhi tatanan politik di Indonesia, di antaranya ialah doktrin politik, landasan rohaniah bangsa, sistem nilai, ideologi politik, dan falsafah Negara.

Banyak hal dan faktor yang mungkin bisa mempengaruhi sistem politik di Indonesia, faktor tersebut antara lain faktor lingkungan, sosial budaya dan keadaan ekonomi di dalam negara. Pengaruh yang dimaksud

⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.9

dapat membuat perlakuan politik di lingkungan masyarakat dalam sebuah negara, yang dikuasai ataupun memiliki kekuasaan dan dikontrol oleh kekuasaan yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, David Easton pernah menyatakan kalau sistem politik ialah kehidupan yang merupakan sebuah interaksi yang ditemukan oleh kebenaran suatu hal dan berhubungan kepada penyebaran nilai-nilai secara otoratif di dalam tatanan masyarakat.⁶

Dalam ketatanegaraan Indonesia setiap masyarakat diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik selama masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Kevin R. Hardwick, partisipasi politik adalah perhatian dari warga negara yang berusaha untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya terhadap para pejabat publik. Meriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan perseorangan ataupun kelompok agar turut serta dan ikut andil dalam pemilihan seorang pemimpin di negaranya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena hal inilah yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁷

Infrastruktur politik di Negara Indonesia mencakup keperluan dan seluruh kebutuhan di dalam ranah politik, dalam hal melaksanakan wewenang yang meliputi sebuah proses serta bentuk pemerintahan yang berlevelkan negara. Perkara ini bisa ditelusuri dengan melirik pada

⁶Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.22-23

⁷Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h.40

beberapa organisasi, prosedur serta sistem kerjanya. Namun demikian, organisasi resmi politik sudah barang tentu adalah partai politik.⁸

Menurut Carl Friedrich, partai politik adalah sekumpulan manusia yang masuk ke dalam organisasi partai dan menetap dengan maksud agar dapat meraih dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan bagi para pemimpin partai yang berasaskan penguasaan tersebut, pemimpin yang memiliki wewenang berharap apabila suatu saat nanti mereka dapat menebar manfaat untuk anggota partai politiknya, baik idealisme ataupun kekayaan materi serta perkembangan lainnya.⁹

Jadi demikian menurut penulis sendiri, partai politik yaitu sekumpulan beberapa orang yang mempunyai pemikiran yang selaras, berniat mengambil dan mempertahankan kekuasaan dengan maksud agar dapat berjuang pada jalan kebenaran dalam suatu level setingkat negara.¹⁰

PSI adalah partai yang memiliki ideologi politik di antaranya terbuka bagi keseluruhan warga negara Indonesia yang telah terpenuhi kriteria perundang-undangan partai politik. Terbuka bagi semua kalangan, baik etnis, suku, agama, keyakinan, ras, gender, dan latar belakang sosial lainnya.¹¹

PSI ketika menggerakkan partainya sangat menghargai asas-asas demokrasi yang mengutamakan perkumpulan atau musyawarah mufakat,

⁸ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.325

⁹ *Ibid.*, h.325

¹⁰ *Ibid.*, h.326

¹¹ Tim PSI, *ABC PSI*, (Jakarta: DPP PSI, 2015), h.11

keteraturan organisasi, menghargai setiap mereka yang berpendapat, dan menolak deskriminasi.¹²

Dalam tatanan organisasi partai, bahwa PSI mengedepankan sistem organisasi dipimpin dengan pemimpin politik teratas berada di bawah Dewan Pembina Pimpinan Pusat. Adapun mengenai kepemimpinan eksekutif pada bidang administratif partai secara keseluruhan berada di bawah wewenang Dewan Pimpinan Pusat. Terpisahnya kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif diyakini sebagai langkah baru agar dapat melakukan pembaharuan di dalam sistem partai politik di Indonesia.¹³

PSI memiliki cara yang ampuh agar partainya menciptakan kondisi yang memiliki banyak anggota, pada dasarnya ini adalah cara untuk mengembangkan rencana utama secara bersama-sama dalam rangka demokratis. Program-programnya pun harus dirancang secara demokratis, di mana setiap anggota partai harus memiliki identitas politiknya sendiri, hal ini ditunjukkan supaya kepentingan yang disepakati bersama dapat direalisasikan, rumusan akhirnya pun tidak selalu dalam teks yang dituliskan. Yang paling terpenting adalah, bagaimana mengembangkan program yang telah disepakati itu. Karena para pakar memiliki ruang terbatas, maka butuh keahlian khusus agar rencana partai tetap berjalan, ini memang bukan perkara mudah karena menarik minat masyarakat memang harus dilakukan dengan cara yang menarik dan unik. Yang paling penting

¹² *Ibid.*, h.12

¹³ *Ibid.*, h.12

adalah melibatkan seluruh anggota partai dengan pengembangan matang serta kompeten dalam proses menarik minat khalayak ramai.¹⁴

Susunan masyarakat yang feodal disatukan dengan sistem politik otoriter monarkis akan menciptakan budaya politik *clientelism*. Masyarakat sudah mengerti akan hal ini, sepengetahuan mereka, bahwa semua perkara yang diterapkan adalah tindakan lumrah dalam politik sehari-hari. Budaya politik *clientelism* pada intinya adalah pola pikir yang unik, di mana keberadaan politik tersebut adalah interaksi yang tidak sebanding. interaksi itu sesuai dengan proses pembentukan susunan dan bangunan politik pada masa sebelum demokrasi, dan sesuai pada intinya terdapat bermacam harapan jikalau pemimpin yang bersifat otoriter akan memberikan perlindungan, memberikan sumber daya dan kemungkinan promosi, sebagai gantinya pemimpin tersebut akan mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat, namun tidak seperti itulah kenyataannya.¹⁵

Dibentuknya PSI bertujuan untuk melawan ketidakadilan, PSI adalah partai modern yang dapat mengikuti perkembangan zaman. PSI bergerak untuk masyarakat Indonesia agar mereka bisa merasakan keadilan di Negaranya. Prinsip politik partai ini adalah prinsip yang benar-benar baru, tidak mentap dalam penjara ideologi yang kuno. Ideologi yang baik adalah ideologi yang dapat dirasakan di zaman sekarang dan dapat memahami peristiwa yang terjadi di masa kini.

¹⁴ *Ibid.*, h.12

¹⁵ *Ibid.*, h.13

Ideologi dapat dikritik, ideologi bukanlah sebuah kitab suci yang benar-benar disucikan dan tidak boleh dinilai. Oleh karena itu dengan membangkitkan PSI yang bersifat maju, maka masyarakat hanya perlu percaya bahwa PSI akan selalu ada sebagai partai yang dapat diandalkan.¹⁶

Pemikiran Politik PSI adalah strategi dan rencana sistematis yang dimiliki Partai tersebut. Setiap Partai Politik mempunyai rencana untuk diimplementasikan dalam kegiatan Partai Politik agar dapat mencapai tujuannya yaitu memenangkan setiap momentum perebutan kekuasaan.¹⁷ PSI sangat progresif dan memiliki karakter yang terbilang cukup hebat karena menjunjung tinggi dasar falsafah Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, permasalahannya sekarang adalah, bahwa tidak sedikit yang beranggapan bahwa PSI adalah partai kontroversi bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia. PSI adalah partai yang dipimpin oleh pemimpin non muslim, yang beranggapan bahwa anggota partainya dilarang untuk poligami serta wajib menjaga kerukunan anggota dengan cara ikut andil dalam pengucapan kata selamat atas hari raya keseluruhan umat beragama, hal ini dilakukan oleh PSI agar solidaritas anggota dan keutuhan NKRI tetap terjaga.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.13

¹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik "Antara Pemahaman dan Realitas"* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.80.

¹⁸ Penekanan masalah Pemikiran PSI, hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan PSI belum berhubungan dengan Dakwah Islam. Dalam hal ini, politik bukan menjadi tujuan utama untuk mencari kekuasaan demi kekuasaan, melainkan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu sebuah pengabdian kepada Allah SWT walaupun dikalangan pemikir Islam masih panjang perdebatan tentang politik dalam wacana Islam baik kontemporer maupun tradisional

Syari'ah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang memiliki tujuan supaya hukum Islam dapat direalisasikan demi kebaikan umat, serta manfaat yang banyak, dan menghindarkan keburukan bagi umat manusia. Dengan kata lain bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu kebaikan ummat di seluruh dunia.¹⁹

Oleh sebab itu, melihat keterangan dan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau lebih lanjut terkait pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia ini saat membina kader muslimnya. Dengan mengangkat judul penelitian:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia”

D. Fokus Penelitian

Peneliti akan terfokus kepada ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (selanjutnya disingkat PSI) yang non muslim dan terfokus kepada pola fikir politik mereka.

E. Rumusan Masalah

Melihat beberapa sumber di atas dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan topik pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Partai Solidaritas Indonesia?

¹⁹Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008), h.87

2. Bagaimanakah cara Partai Solidaritas Indonesia memimpin anggotanya yang beragama Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih mengenai penelitian disebut adalah:

1. Agar dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia.
2. Untuk mengetahui cara PSI memimpin anggotanya yang beragama Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang disebut ialah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang berkaitan dengan pemikiran politik PSI, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Memberikan pengetahuan bagi siapapun yang membaca informasi tentang pemikiran politik PSI.
 - c. Bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan bisa dikembangkan sebagai rujukan ideologi partai.

- d. Sebagai tambahan data dan referensi, bahan pustaka atau literatur, terlebih khusus ketika memahami Ideologi suatu organisasi.
- e. Bisa digunakan sebagai inti daripada bahan kajian untuk penelitian selanjutnya sehingga lebih mudah mendalami masalah yang dibahas.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pengetahuan untuk peneliti dalam hal menyertakan disiplin ilmu sehingga dapat disebar luaskan dengan mengikuti studi yang diambil dalam mata kuliah inti dan ditinjau lebih dalam lagi melalui pelajaran-pelajaran yang sama dengan disiplin ilmu yang disebut.
- b. Bisa digunakan sebagai pendalaman ilmu pada bidang Hukum Tata Negara, terutama kalangan Masyarakat luas sehingga bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca dan manfaat kepada peneliti sendiri terutama mengenai masalah ideology politik.
- c. Memberikan ilmu pengetahuan terlebih khusus pada ilmu tata negara sehingga dapat digunakan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Ideologi Politik Partai Solidaritas Indonesia.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi para pegiat politik praktis sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembangunan kepartaian yang lebih baik,

matang dan professional guna meningkatkan kualitas dinamika demokrasi secara keseluruhan.

- e. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini sangat cocok untuk ditinjau dan dikaji lebih lanjut.

H. Metode Penelitian

Mengikuti istilahnya, penelitian sesuai dengan bahasa Inggris ialah *research* yang bersumber dari dua kata yakni *re* dan *search*. *Re* yang artinya mengulang ataupun kembali serta *search* yang artinya menengok, menjelajah, atau mendapatkan suatu gagasan dan arti secara berulang.²⁰

Metode yang disebut ialah cara yang paling ampuh dalam melaksanakan sesuatu, memakai fikiran secara bersama agar dapat memberikan pencapaian yang maksimal. Dalam menggagas skripsi ini, peneliti memakai metode dan cara analisis kualitatif yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Cara ini juga meliputi penyesuaian secara ilmiah dengan penulisan yang baku agar dapat memberikan jawaban yang baik dan benar mengenai rincian masalah yang sudah disiapkan sesuai dengan jenis dan sifat penelitian.²¹

Adapun pemilihan metode dalam penelitian, peneliti sudah menyiapkan berbagai komponen, hal ini dilakukan agar suatu penelitian dapat dilaksanakan dengan mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam penulisan skripsi dan karya ilmiah:

²⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.25

²¹ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1997),

1. Pendekatan serta Jenisnya

Dilihat melalui kriterianya, skripsi ini bersifat pustaka (*library research*). Penelitian ialah penelitian yang dilakukan dengan memakai sumber (kepustakaan) baik itu catatan, buku, terlebih laporan yang dihasilkan pada penelitian oleh peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai data primer.²² Informasi selanjutnya terhadap pendekatan yang ada pada penelitian yang disebut ialah penelitian yang memakai pendekatan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang disertakan berdasar bahan hukum utamanya, dengan cara memperdalam asasnya, teorinya dan konsep hukumnya serta peraturan perundang-undangan-nya yang terkait dan terhubung dalam skripsi ini. Mengenai proses yang dilakukan, skripsi ini menggunakan informasi dan data dalam masalah yang bertentangan dengan hukum Islam mengenai Pemikiran Politik Partai Solidaritas Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data.

Dalam skripsi ini kajian yang dipakai adalah kepustakaan, terhadap judulnya yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran politik Partai Solidaritas Indonesia baik literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menjadi inti dalam mengeluarkan beberapa pokok masalahnya.

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.10

Sumber data pada skripsi yang disebut dapat digolongkan menjadi tiga yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang didapatkan dalam skripsi ini berasal dari literatur yang langsung dari al-Qur'an, hadis, fiqh, undang-undang tentang perkawinan, AD/ART PSI dan ABC PSI. Dalam hal ini penulis mengambil sumber hukum asli dari bahan hukum tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku penunjang lain seperti *Sistem Politik Indonesia*, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, *Komunikasi Politik*. Dan literatur buku lainnya yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data yang didapat meliputi data yang sudah dikumpulkan dan diteliti oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan sesuai permasalahan penelitian berupa ensiklopedi, jurnal, karya tulis, media online, serta beberapa artikel yang diharapkan bisa menjadi penyokong penelitian yang disebut.

3. Prosedur Pengumpulan Data.

Dokumentasi ialah cara yang dipakai pada penelitian kali ini, bahan-bahan dan referensi bisa ditelusuri dengan mengumpulkan beberapa materi pustaka, yakni mendapatkan data dan mengolahnya

pada objek penelitian.²³ Dan terkumpullah beberapa bahan tersebut dalam suatu variabel tertentu yang berupa buku, surat kabar, artikel, catatan, dan lain sebagainya. Teknik tersebut digunakan melalui berbagai metode yakni menginventarisasi, menganalisis, mencatat, mencari serta mempelajari beberapa data yang merupakan bahan pustaka yang berhubungan, serta melalui cara meninjau beberapa sumber kepustakaan yang disebut.

4. Prosedur Pengelolaan Data

Pada umumnya pengolahan data dapat dilakukan setelah data dapat dikumpulkan, pengolahan itu meliputi:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengecek kembali atau mengoreksi kembali data yang sudah dikumpulkan, agar terhindar dari kekhawatiran data yang tidak terpenuhi ataupun tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam pemikiran politik PSI. Dan memeriksa kembali kesesuaian dengan masalah yang akan peneliti lakukan ketika data terkumpul secara menyeluruh.
- b. Penandaan data (*coding*) yakni menyertakan catatan referensi yang membuktikan sumber dan jenis data, data itu berasal dari al-Qur'an dan hadis, ataupun beberapa bahan buku literatur yang sama terkait masalah yang terdapat di dalam pemikiran politik PSI.
- c. *Rekontruksi* data adalah penyusunan kembali inti dari pemikiran politik PSI secara teratur dan berurut, sesuai logika sehingga dapat

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed.) Cet.4 (Jakarta: Rinneka Cipta, 1998), h.236

dimengerti sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian dapat disimpulkan sebagai tahap terakhir pada suatu proses penelitian.²⁴

5. Metode Analisa Data

Dalam mengolah data, tahap yang dapat dipakai ialah analisa dengan cara kualitatif, yakni menganalisa data dari sumber yang sangat terpercaya agar dapat memenuhi kebutuhan yang penulis harapkan. Metode yang dipakai dalam menganalisa data pada skripsi ini adalah melalui cara penulisan Induktif. Metode induktif ialah suatu cara dan pola fikir yang mengangkat dari fakta-fakta secara khusus dan peristiwa-peristiwa yang terpercaya, kemudian beberapa fakta yang khusus konkrit generalisasi disifatkan dalam kategori umum. Dengan metode yang sudah dikembangkan secara baik itu penulis akan memberikan gambaran akhir bahwa pertentangan dan konflik di dalam PSI harus segera diluruskan.

²⁴ Amirudin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARTAI POLITIK

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam ialah sebuah istilah hukum yang pembahasannya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap apapun yang berkenaan dengan wilayah kajian hukum dari agama Islam, ini adalah bagian kelompok daripada perihal agama Islam dengan sebutan *syara'*.

Adapun lafaz *Syari'ah* atau *Syara'* itu sendiri secara bahasa berasal dari lafaz bahasa Arab *Syari'*, *Syari'a wa syari'atu yasra'*. Yang berarti *tariqat*, atau *Sunnah*²⁵

Sedangkan untuk pengertian lafaz *Syari'ah* secara istilah terdapat dua batasan definisi yang saling menguatkan satu sama lainnya, yaitu batasan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah:

- a. Menurut *Ibnu Taimiyah*, *Syari'ah* berarti ketetapan hukum yang di syari'atkan kepada seorang hamba untuk dijalankan, ketetapan ini berasal langsung dari Allah *swt*. Dengan demikian, menurut Ibnu Taimiyah *Syari'ah* itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung ataupun tidak langsung bersumber dari Allah yang harus diikuti

²⁵ Bunyana Sholihin, "Kaidah Hukum Islam" (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.9, mengutip Abu Lowis Ma'luf. *Al-Munjid* (Daar al-Masyreq, Bairut, 1973), h.382, dikutip oleh Bunyana Sholihin, "Kaidah Hukum Islam" (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.9.

- b. Secara istilah hukum *Syari'ah* mengandung arti bahwa apa yang menjadi tetapan Allah untuk hamba-hamba-Nya, tidak lain merupakan ketentuan-ketentuan hukum²⁶. Definisi kedua ini ternyata menguatkan pengertian definisi yang pertama, yaitu memberikan penekanan bahwa *Syari'ah* itu bersumber dari Allah untuk diikuti dan ditaati oleh umat manusia.²⁷

Masing-masing kedua batasan *Syari'ah* tersebut menyebutkan istilah ketetapan hukum yang berasal daripada Allah yang memiliki kedudukan tertinggi. Menurut Ahmad Hasan, yaitu seorang intelektual muslim Pakistan dalam karya monumentalnya yang berjudul *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, ditegaskan bahwa *Syari'ah* itu ialah sebutan yang dipakai dalam bahasa hukum mengikuti jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit. Menurut keterangan tertera, bisa disimpulkan bahwa *syari'ah* ialah cakupan hukum islam yang harus ditaati dan dipatuhi secara menyeluruh yang menimbulkan suatu kemudahan bagi yang menjalankan dan sanksi yang tegas bagi para pembangkang atau bagi para pelanggarnya.²⁸

2. Sumber Hukum Islam

Uraian mengenai Hukum Islam terdahulu pada hakekatnya sudah memberikan arahan yang cukup jelas mengenai *Sumber Hukum Islam*.

²⁶ Abu Lowis Ma'luf *Al-Munjid*

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Syarhu Kitab al-Siyasati al-Syar'iyah*, terjemahan Bunyana Sholihin (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.10.

²⁸ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi dari "*The Early Development of Islamic Jurisprudence*", (Islambad: Islamic Research Institute Pakistan, 1970)., Penerbit PUSTAKA ITB, 1984 h.9

Namun karena masih sering didapatkan kerancuan mengenai apa yang diebut *Sumber Hukum* dan *Dalil Hukum* dalam Islam, agar lebih memperjelas perbedaan antara asal serta dalil dalam Hukum Islam.

Sumber hukum dimaksudkan disini adalah suatu tempat awal dari mana atau di mana didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi *sumber hukum* dalam Islam hanya dapat ditemukan jawabannya melalui petunjuk agama Islam itu sendiri, yakni *al-Qur'an* serta *Sunnah* Rasulullah saw.

Sesuai daripada nash *al-Qur'an* dan *Sunnah* ialah asal dan inti ajaran Islam memiliki sebuah petunjuk yang menyertai asal hukum Islam. Di antaranya ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di-antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu (karena tidak terdapat nash *al-Qur'an* dan/atau *Sunnah*), maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Qur'an*) dan rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S *al-Nisa*: 59)

Pada ayat di atas menerangkan tentang kesepakatan pendapat ulama tafsir yakni mentaati aturan Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban mentaati *al-Qur'an* dan *Sunnah*. Sedang mengikuti perkataan *Ulil Amri* (pemerintah penguasa) ialah perihal wajib untuk taat pada

kesepakatan lembaga hukum pemerintahan atau Ijma', sedangkan anjuran untuk mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya juga ialah anjuran wajib mengembalikan atau menyandarkannya kepada makna atau cakupan nilai *al-Qur'an* dan *Sunnah* melalui praktek *Ijtihad* dengan menerapkan teori Qiyas.

Beranjak dari penafsiran ulama tersebut maka tidak terdapat pengingkaran bahwa *Sumber Hukum* dalam Islam ialah *al-Qur'an* dan *Sunnah* sebagai sumber wahyu, sedangkan Ijma' dan Qiyas sebagai *sumber rasio*. Oleh karena itu, sumber hukum dalam Islam terdiri dari *sumber wahyu* dan *sumber rasio*. Kesimpulan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah *saw* sebagai mana berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal bahwa ketika Rasulullah mengutus dirinya ke Yaman sebagai qadhi, beliau bersabda “Bagaimana kelak engkau akan memberikan keputusan bila dihadapkan kepadamu suatu perkara?”. Ia (Mu’az) menjawab: “Akan aku tetapkan dengan kitabullah, bila belum aku dapatkan maka akan aku tetapkan dengan sunnah rasul-Nya, bila masih belum juga aku dapatkan aku akan berijtihad daengan analisa akalku dan aku tidak akan berlebihan”. Maka serta merta rasulullah menepuk dadanya, seraya mengatakan: “Segala puji bagi Allah telah menetapkan utusan rasul-Nya dengan orang yang diridlai rasul-Nya”. (HR. al-Baihaqi No. 3250)

Pada hadis dialogis yang diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal tersebut menggambarkan penegasan mengenai restu Rasulullah *saw*,

akan sumber rujukan hukum yang direncanakan *Mu'az bin Jabal* manakala ia akan mengambil keputusan hukum di Yaman kelak, yakni *al-Qur'an*, *Sunnah* serta *Ijtihad (rasio)* dengan prioritas secara urut dan tertib.

Merujuk pada kedua nash tersebut maka disepakati kalangan ulama bahwa *Sumber Hukum Islam* itu dibagi menjadi dua macam sumber, yaitu *wahyu* serta *Akal* sebagai mana dalam uraian berikut.

a. Wahyu (Naql)

Sumber wahyu adalah sumber hukum yang berupa wahyu, baik itu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasulullah Muhammad *saw*, lewat perantaraan malaikat Jibril maupun wahyu yang langsung difahami oleh Rasulullah dalam bentuk *Sunnah*. Sumber wahyu yang dimaksudkan di sini sering juga disebut sumber Naqli yang terbagi antara *al-Qur'an* dan *Sunnah*.²⁹

Adapun *al-Qur'an* secara bahasa bersumber dari lafaz Arab *qara'a*, *yaqra'u*, *qara'an*. Yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilahnya yang dimaksud pada penyebutan *al-Qur'an* itu ialah wahyu yang diturunkan untuk rasulullah Muhammad *saw*, lewat malaikat jibril yang dipakai menjadi aturan hidup untuk beliau dan ummat nya agar tidak melanggar peraturan yang sudah menjadi tetapan oleh Allah *swt*, *al-Qur'an* berupa firman-firman yang dilafadzkan dalam bahasa arab membentuk *mushaf* yang diawali dari surah *al-fatihah* serta

²⁹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.11-14

berakhir dengan surah *an-nas* sebagai penjelasan yang menyangkut kemaslahatan hidup umat manusia, baik kemaslahatan mereka di akhirat maupun di dunia.³⁰

b. Rasio (Akal)

Adapun *Rasio* (Akal) adalah proses kerja ratio atau akal manusia yang mampu memahami dan menganalisa tekstual wahyu dan realita fenomenal. Sumber ratio dalam ungkapan bahasa hukum dalam Islam sering juga disebut *Aql*. Sehingga disepakati Sumber Rasio sebagai Sumber Hukum dalam Islam ini terdiri dari *Ijma'* dan *Ijtihad*. dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

1) *Ijma'* menurut bahasa memiliki dua pengertian:

- a) Yakni niat serta kehendak terhadap suatu hal. Sabagai contoh apabila ditanya “*si Fulan berijma atas itu*”, apabila ia berniat untuk itu.³¹

Pengertian seperti ini tergambar dalam firman Allah swt:

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

³⁰ Bunyana Sholihin, “Kaidah Hukum Islam” (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.14, mengutip Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Mesir : Dar al-Ta’lif, 1964), h.32 , dikutip oleh Bunyana Sholihin, “Kaidah Hukum Islam” (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.14.

³¹ *Ibid.*, h.15

وَشُرَكَاءَكُم تَمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضَوْا إِلَيَّ وَلَا

تَنْظُرُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”. (Q S Yunus : 71)

Juga dalam sabda Rasulullah saw., dalam Hadits no. 656 dari kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar membawakan hadits:

مَنْ : قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّ حَفْصَةَ وَعَنْ وَمَالَ ، الْخَمْسَةَ رَوَاهُ لَهُ صِيَامَ فَلَا الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّيَامِ يُبَيِّتَ لَمْ خُزَيْمَةُ ابْنُ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ ، وَقَفِهِ تَرْجِيحَ إِلَى وَالنَّسَائِيُّ التِّرْمِذِيُّ اللَّيْلِ مَنْ يَفْرُضُهُ لَمْ لِمَنْ صِيَامَ لَا وَلِلدَّارِقُطِيِّ حَبَّانَ وَابْنُ

Artinya: “Dari Hafshoh Ummul Mukminin bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Barangsiapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.” (Hadits ini dikeluarkan oleh yang lima, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah).³²

Berdasarkan hadis ini maka tidak salah untuk mengartikan

lafaz Ijma’ dengan arti “Niat yang bulat”

³² Hadis yang ditarjihkan oleh Al-Daruquthni, juz 2,h.173

b) Kesepakatan terhadap suatu hal. Dikatakan: “*Suatu kaum ijma’nya begini*”, apabila mereka sepakat hal yang demikian itu. Berdasarkan ini maka kesepakatan setiap kelompok atas satu dari sejumlah perkara, baik menyangkut urusan dunia maupun agama disebut “Ijma’.

Perbedaan antara dua pengertian itu, bahwa Ijma’ dalam pengertian pertama terwujud dari satu orang sebagaimana telah kita sebutkan, sedangkan Ijma’. Dalam pengertian kedua tidak dapat terwujud kecuali dengan dua orang atau lebih.³³

2) Ijtihad (mengeluarkan hukum dari masalah), yaitu model kerja penelitian berupa upaya menggali, mengetahui dan memastikan hukum sesuatu yang tidak tenaskan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah melalui analisa logika. Dan definisi Ijtihad selengkapanya adalah :

*(ijtihad itu adalah pengerahan seorang Faqih kemampuannya mengeluarkan hukum syara’ dari dalil-dalil nya yang terperinci)*³⁴

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Partai Politik menurut al-Qur’an dan Sunnah.

³³ Bunyana Sholihin *Kaidah Hukum Islam*

³⁴ Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul Fiqh al-Islami*

Pada mulanya arti daripada partai dan politik itu sangatlah beriringan, dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, dalam bahasa Indonesia istilah partai mengarah kepada organisasi politik dan sosial yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan, sedangkan istilah politik mengarah kepada daya dan upaya seseorang berupa keinginan untuk memperoleh kekuasaan itu. Ketika dua kata tersebut disatukan kedalam suatu kalimat maka partai politik memiliki makna yang berbeda. Partai politik ialah organisasi kemasyarakatan yang didirikan untuk memperjuangkan hak agar mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara.

Pada kitab al-Qur'an istilah partai adalah *hizb*, Partai (*Hizb*) sangat jelas memiliki arti; pertama, adalah komunitas yang mempunyai kemiripan konsepsi serta aktivitasnya; kedua, perkumpulan yang memiliki kekuatan serta persaudaraan; ketiga, banyak sekali anggota dan para pengikutnya.³⁵ Melihat dari penjelasan istilah, partai atau *hizb* ialah kumpulan kelompok atau perkumpulan masyarakat yang bersatu karena mempunyai tujuan, target, dan arah yang sama.³⁶ Di dalam al-Qur'an ada beberapa istilah daripada *hizb* tersebut, di antaranya adalah:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ آلَ حَزَابٍ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿١٢﴾

³⁵ Syauqi Dhaif, *Almu' jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), h.170

³⁶ Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, (Kairo: Nahdhah Mishr, 1998), h.184

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata: “inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah Dan Rasul-Nya” dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan”. (Q.S al-Ahzab’: 22)

Ayat di atas memiliki penjelasan perkara nikmat daripada Allah atas mereka yang mempunyai iman, dimana Allah membuka tipuan golongan azhab serta penyerangnya. Selain itu redaksipun mendeskripsikan kacaunya dua golongan perang yakni perang Ahzab dan perang Bani Quraizhah, melalui dekripsi yang sebenarnya, dalam beberapa tragedi yang berturut-turut. Ia mendeskripsikan perasaan-perasaan batinnya serta beberapa gerakan nyata. Juga dialog antara beberapa komunitas dengan beberapa individu.³⁷

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang” (Q.S al-Ma’idah : 56)

Mengikuti tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menerangkan kalau surah al-Maidah ayat 56 tersebut menjelaskan suatu keharusan manusia untuk mewalikan Allah, sebab yang memiliki pertolongan dan pembelaan kuat hanyalah Allah saja. Tanpa izin dari Allah tidak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan, karena izin Allah di atas segalanya. Dalam hal menjadikan Allah sebagai wali, maka Rasulullah

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur’an IX Juz XXI: Akhir al-‘Ankabuut s.d. Permulaan al’Azhab.*, h.212

adalah contoh dan suri tauladan yang baik. Adapun, setelah Rasulullah saw orang-orang berimanpun dapat dijadikan tauladan bagi mereka juga, orang-orang beriman ini dapat dilihat dari sifat dan sikapnya, bagaimana ia mendirikan sholat, bagaimana ia membayar zakat, bagaimana taatnya dalam menjalankan puasa, serta dapat dilihat dari berbagai aspek seperti sunnah dan kemampuan berfikirnya. Di samping itu mereka juga senantiasa rukuk atau tunduk kepada Allah, melaksanakan semua tuntutan³⁸.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Syaithan itu adalah musuh bagimu, maka tetaplah engkau anggap ia musuh. Karena sesungguhnya kampanye syaithan-syaithan itu tidak lain untuk mengajak anggota partainya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala” (Q.S Fathir : 6)

M Quraish shihab juga menerangkan, mengenai ayat tersebut adalah keharusan manusia untuk selalu berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak tergoda oleh rayuan setan. Setan ialah musuh yang nyata bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, walaupun manusia tersebut mengikuti keinginannya tetap saja ia disebut sebagai musuh. Tugas setan ini tidak lebih hanyalah penyesat dan penjerumus ke dalam lubang kebinasaan, setan akan selalu menyesatkan manusia secara terus

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 3, h.133

menerus tanpa kenal lelah, selama manusia ada di dunia maka setan tidak akan berhenti melaksanakan tugasnya, setan sangat menyukai tugas ini terlebih lagi bila ia berhasil memperdaya manusia tersebut. Terkecuali manusia yang menentang kata-katanya, setan sangat benci orang-orang seperti ini, dia tidak akan pernah berhasil mendorong mereka. Sebab inilah yang membuat setan marah. Permusuhan antara manusia dan setan ini bersifat kekal, sampai kapanpun, setan tak terampuni.³⁹

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ
 أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Syaithan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah; mereka itulah partai syaithan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaithan itulah golongan yang rugi*”. (Q.S al-Mujadalah’ : 19)

Orang munafik adalah orang yang memiliki muka dua, mereka ini adalah kaum yang tidak dapat dipercaya. Mereka seolah-olah memusuhi orang-orang yang beriman ketika dirinya berada di lingkungan Yahudi tanpa segan sedikitpun mereka menceritakan aib orang beriman. Namun, apabila orang-orang munafik itu masuk di antara kumpulan orang beriman ia juga bersikap kalau dirinya berada dipihak orang beriman. Iman yang mereka tunjukkan tidak lain hanyalah topeng yang digunakan untuk menutupi kebobrokan mereka. Orang-orang munafik akan menghalangi jalan bagi mereka yang memiliki keimanan yang

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 11, h.433

belum cukup kuat, mereka akan menanamkan keraguan serta menutup ruang terhadap agama Islam. Golongan munafik itu akan diganjar oleh Allah *swt*, dengan azab yang amat perih ketika berada di akhirat nanti. Mereka tidak mungkin mendapati penolong dari siapapun juga untuk membebaskan diri dari azab itu.⁴⁰

Pada surah al-Mujadalah ayat 19 dijelaskan mengenai tabiat dari orang-orang munafik ini, sifat mereka tidak lebih dari sifat yang dimiliki oleh syaithan. Akal mereka akan dijauhkan dari kebaikan. Perilaku tidak terpuji yang mereka lakukan telah dikuasai oleh tipu daya syaithan. Fikiran orang-orang munafik itu didekatkan kepada pembangkangan. Syaithan menipu mereka dengan perilaku buruk, hingga pada akhirnya orang-orang munafik itu merasa bangga apabila melakukan kesalahan dan tidak akan merasa bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Hal inilah yang menjadikan mereka lupa akan azab yang menanti di akhirat kelak. Mereka dijuluki *Hizbussyaitan* atau pasukan pengikut setan.⁴¹

Kehidupan manusia di era sekarang sudah sangat mengerti sekali apa itu parta politik, baik yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Kecuali Negara seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam dan sebagainya, Negara tersebut menganut sistem monarki absolute, mereka tidak menggunakan sistem partai karena kekuasaanya mutlak dipegang raja. Sementara hampir semua negara di

⁴⁰ Jani Arni : Hizbullah dan Hizbussyaitan dalam Al-Qur'an, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 39,no. 1 Januari-Juni 2014., h. 147

⁴¹ Ahmad Mustofa Al Maraghi, Tafsir al-Maraghi., h.28

dunia ini menggunakan sistem kepartaian sebagai satu atribut politik negaranya.

Sistem partai ini bisa dibilang praktek modern, karena pada masa pemerintahan Rasulullah *saw* serta sahabat terkemuka dahulu tidak pernah menggunakan sistem partai ini, pemilihan pemimpin secara mutlak dipegang oleh pemimpin sebelumnya, mereka akan ditunjuk secara langsung untuk melanjutkan estafet dan perjuangan dari pemimpin sebelumnya. Adapun lembaga yang paling terkenal ialah *Ahl al Halli wa Al-'Aqdi*, anggotanya para sahabat yang sangat masyhur pada masa itu. Setelah pemimpin terpilih sudah ditunjuk, maka seluruh masyarakat turut serta membai'at kepadanya, hal ini menyatakan bahwa mereka telah mempunyai pemimpin baru. Adapun pengangkatan perangkat seperti gubernur serta jajarannya dapat ditentukan oleh kepala Negara yang menjadi pemimpin di Negara itu. Inilah praktik yang diterapkan pada zama Rasulullah *saw* dan para sahabat.⁴²

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Partai Politik menurut Ijtihad Ulama

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib banyak dikalangan umat Islam yang membuat alirannya sendiri, aliran itu antara lain adalah *Syi'ah*, *Mu'tazila* dan *Khawarij*. Pecahnya umat Islam ini terjadi ketika pemerintahan *sayyidina* Ali berperang melawan pasukan Mu'awwiyah dan Shiffin. Tidak sampai disitu saja, bahkan aliran baru tetap muncul

⁴² Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, (Delhi: Idarah-I Delli, 1998) h.55-62, terjemahan Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: Synergymate Sdn Bhd, 1998) h. 211-216

setelah perang Shiffin berakhir, aliran itu adalah *Ahlussunah wal-Jama'ah*, *Murji'ah*, dan sebagainya. Kebanyakan ulama dan pakar *fiqh siyasah* berkeyakinan bahwa partai politik muncul akibat peristiwa ini.⁴³ Akan tetapi istilah partai politik belum ada pada saat itu. Mereka hanya beranggapan bahwa aliran yang dianut adalah yang terbaik, oleh karena itu jarang sekali di antara mereka yang keluar atau pindah kepada aliran lain. Perlu diperjelas kembali bahwasanya aliran yang dianut hanyalah aliran agama, tidak ada satupun unsur politik di dalamnya, mereka berbeda-beda pemikiran. Merekapun tidak melakukan kampanye ketika ingin memilih kepala Negara ataupun pemimpin, sangat bertolak belakang dengan partai politik di zaman sekarang.

Para ahli *Siyasah* menurut kebanyakan sumber buku, mereka mencantumkan permasalahan parpol dengan istilah *Hizb* di dalam al-Qur'an. Mereka menjelaskan kata *Hizb* ialah sebutan terhadap istilah partai di era sekarang, merekapun mengaitkan firman Allah di dalam al-Qur'an: "*Kullu hizbi bima ladihim faarihun* (setiap mereka yang mempunyai kelompok (partai) sangat sombong dengan hal yang terdapat pada kelompok mereka (masing-masing)).⁴⁴ Pada ayat lainnya Allah berfirman: *Minal laziyna farraquw minhum wakaanu syiyya'a. Kullu hizbi bima ladaihim faarihun*" (Yakni sekumpulan manusia yang membuat agama mereka terpecah menjadi banyak. Setiap kelompok merasa

⁴³ *Ibid.*, h.216

⁴⁴ Surah al-Mu'minun (23:53)

sombong dengan golongannya sendiri.⁴⁵ Berkenaan dengan masalah tersebut sebuah hadis Rasulullah *saw* menjadi sandaran terpecahnya umat Islam: “*Taftariqu umati ‘ala tsalatsi wa sab’iyna Firqatan*” (Ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan)⁴⁶

Arti kata *Hizb* dan *Firqah* di dalam ayat serta hadis yang disebutkan di atas mengarahkan kepada kelompok ataupun golongan yang terpecah dan terbelah. Allah menjelaskan bahwa masing-masing kelompok diantara mereka merasa bangga dengan kelompoknya itu sendiri, sudah tentu budaya kelompok yang berpecah tersebut tidak lagi menganggap serius dengan kebenaran kelompoknya. Dari penjelasan inilah timbul ketidaksesuaian dengan kehendak Islam dari kontek perpaduan Ummah (*Ukhuwah Islamiyah*) yang dijuluki *Ummatan wa hidah*.⁴⁷

Menurut pemaparan Sa'id Hawa, arti kata *Hizb* dalam al-Qur'an lebih mengarahkan pemilihan konsepsi *haq* dengan *bathil*. Kalimat *Hizb Allah* yang berarti menjadi golongan Allah mengarahkan kepada ummat Allah yang menjalankan kebenaran serta menjauhi apa yang dilarangnya secara kaffah. Adapun *Hizb as-Syaithan* yang berarti kelompok pengikut Syaithan adalah golongan manusia yang menentang apa yang Allah

⁴⁵ Surah al-Rum (30:32)

⁴⁶ “Abdul Qadir bin Thair al-Baghdadi, *al-Faraq bayna al-Firqah*, (Beirut: Da'ar al-Fikr, 1973), h.4-5, terjemahan Lukman Thaiib, *Political System of Islam*, (Kuala Lumpur: Amal, 1994), h.77

⁴⁷ Surah Yunus (10:19)

perintahkan, ikut kepada bisikan setan dan melakukan apa yang Allah larang.

Arti kata *Hizb Allah* adalah partai yang senantiasa membela dan mengikuti apa yang Allah kehendaki, menurut Kamus istilah keislaman.⁴⁸ Al-Qur'anlah yang menerangkan makna dan artinya di atas adalah sebagai berikut:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:”Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka kedalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) Nya” (Q.S al-Mujadalah : 22).

Mereka adalah kelompok Allah. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah kelompok yang bersama Allah yang paling beruntung.⁴⁹

⁴⁸ Moh, E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka 1987),. h.45

⁴⁹ Surah al-Mujadalah (58:22)

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Arti kata partai sesuai pandangan Maurice Duverger adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan faksi-faksi di dalam republik era lampau, kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk di wilayah *conditeri* pada zaman Renaisans Italia, kelompok ini diisi oleh anggota-anggota komite konstitusional, organisasi social, dan anggota-anggota dewan revolusi yang menjadi pencipta opini publik Negara demokrasi kontemporer, mereka berkumpul di kelab-kelab *conditeri*. Semua lembaga-lembaga itu memiliki peran untuk memenangkan dan menerapkan penguasaan dalam politik.

Partai politik adalah kelompok masyarakat yang membentuk suatu organisasi politik secara sukarela, atas dasar dan kemauan mereka sendiri agar dapat memperjuangkan nilai-nilai dan cita-cita luhur, selain itu pula partai politik dibentuk untuk membela bangsa dan negara, kepentingan politik anggota, masyarakat serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu diketahui bahwa partai politik bersifat nasional, setidaknya inilah yang telah diterangkan di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 1 ayat (1).⁵⁰

Partai Politik diisi oleh “seluruh warga negara Indonesia yang memiliki peran untuk menguasai dan menerapkan kebijakan umum,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

setidaknya sedikit banyak diantara mereka telah terorganisir sehingga dapat bertindak sebagai suatu kesatuan dalam ranah politik tujuannya adalah kekuasaan dan wewenang yang ingin mereka miliki”, pemaparan tersebut menurut R.H Soltau.⁵¹

Partai Politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan beserta penguasaan struktur agar dapat memperjuangkan ideologi beserta nilai-nilai tertentu, partai politik merupakan sebuah organisasi yang ikut serta di dalam pemilu (pemilihan umum), pemaparan tersebut menurut Pamungkas.⁵²

Pamungkas pun menambahkan definisi di atas menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut di bawah ini.

Pertama, bahwa partai adalah organisasi politik yang mengedepankan beberapa prinsip seperti adanya pemimpin, anggota, spesifikasi dan devisionisasi. Tujuannya digunakan untuk melaksanakan perencanaan dalam organisasi serta mengontrol tingkah laku daripada anggota organisasi tersebut. Hal ini lah yang menjadi aturan main di dalam sebuah partai.

- a. Kedua, bahwa partai adalah alat yang memberikan semangat dan daya juang terhadap ideologi atau nilai yang terkandung. Anggota partai sangat meyakini bahwa keterikatannya terhadap organisasi akan meningkatkan kolektivitas individu.

⁵¹ R.H Soltau Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), h.161

⁵² Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and welfarism, 2011), h.5

- b. Ketiga, bahwa partai memiliki perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik memang diciptakan untuk hal ini bahkan bisa lebih dari pada itu, partai politik dapat memperluas kekuasaan dan mempertahankannya.

Keempat, bahwa partai politik adalah alat yang hanya dapat meraih kekuasaannya melalui pemilihan umum (pemilu), hakikatnya partai politik mendapat kekuasaan ketika memenangkan pemilu. Adapun pencapaian suatu organisasi yang diwujudkan tidak melalui pemilu maka golongan itu tak layak disebut partai politik.⁵³

Istilah partai politik jika melihat dari sudut pandang Sigmund neuman (dalam Meriam Budiardjo) adalah seluruh aktivis-aktivis politik yang berkumpul membentuk organisasi untuk mendapatkan suara dan dukungan masyarakat sehingga dapat memenangkan persaingan diantara partai politik lain yang dianggap sebagai saingannya.⁵⁴

Bila melihat dari sudut pandang yang telah dideskripsikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa partai politik diciptakan secara bersama-sama dan untuk mendapatkan tujuan secara bersama-sama juga. Oleh karena itu, bahwa partai politik diciptakan untuk kepentingan masyarakat dan harus diperjuangkan. Bila kita melihat dari sudut pandang Hukum Islam, maka arti dari partai politik sedikit berbeda, letak perbedaannya terdapat di dalam tujuan utama partai politik, hukum islam sangat menjamin dan memelihara hukum Allah *swt*

⁵³ *Ibid.*, h.6

⁵⁴ Meriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.162

yang artinya setiap lembaga yang memerintah tidak boleh bertentangan dengan perkara ini.⁵⁵

2. Tujuan Partai Politik

Partai Politik mempunyai tujuan untuk menyusun sebuah ideologi tertentu dan menjalankan program-program yang sudah mereka sepakati untuk mempertahankan kekuasaannya. Apabila disuatu wilayah terdapat sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama seperti tertera diatas maka kelompok tersebut adalah Organisasi Masyarakat (lebih familiar disebut Ormas). Biasanya partai politik berawal dari ormas, asal terciptanya partai politik dimulai dari suatu ormas yang memiliki wewenang dan kekuasaan di wilayah itu dengan tujuan menarik massa yang banyak.

a. Tujuan Partai Politik secara umum sebagai berikut:

- 1) Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan terhadap suku dan bangsa serta bahasa, dibentuknya partai politik ini agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa seperti yang sudah tertera pada pembukaan UUD 1945. Dengan tidak memperdulikan segala perbedaan agama, bahasa ataupun suku, Partai Politik harus mewujudkan impian itu secara menyeluruh bukan golongan tertentu saja.

⁵⁵ Penekanan masalah Partai Politik Islam, hal ini dimaksudkan bahwa kagiatan Partai Politik berhubungan dengan Dakwah Islam. Dalam hal ini, politik bukan menjadi tujuan utama untuk mencari kekuasaan demi kekuasaan, melainkan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu sebuah pengabdian kepada Allah SWT walaupun dikalangan pemikir Islam masih panjang perdebatan tentang politik dalam wacana Islam baik kontemporer maupun tradisional

- 2) Tujuan selanjutnya daripada Partai Politik adalah menjaga kerukunan bangsa serta keutuhan NKRI. Partai Politik tidak digunakan untuk memecah belah dan membuat stigma negatif terhadap kerukunan bangsa.
- 3) Partai politik digunakan sebagai alat untuk mengembangkan semangat demokrasi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, selain itu juga partai politik dijadikan alat untuk mempererat bangsa, mengembangkan kedaulatan rakyat, mengangkat setinggi-tingginya nilai yang terdapat pada Pancasila serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum mengerti apa arti dari parpol.

b. Tujuan Partai Politik secara khusus sebagai berikut:

- 1) Untuk memajukan serta mengembangkan keikutsertaan politik terhadap anggota partai itu sendiri dan masyarakat supaya terselenggaranya kegiatan politik ataupun pemerintahan.
- 2) Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan partai politik dalam cakupan yang lebih luas.
- 3) Sebagai instrumen untuk meningkatkan budaya serta etika dalam berpolitik, yang mencakup kehidupan masyarakat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

3. Kegunaan Partai Politik

⁵⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik "Konsep Teori, dan Strategi"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Edisi Revisi 2011, h. 170

Partai Politik mempunyai banyak kegunaan dalam penyelenggaraannya di dalam negara demokrasi ini, diantaranya ialah seperti tertera di bawah:

a. Partai Politik sebagai Instrumen komunikasi

Fungsi Partai Politik yang pertama adalah mewujudkan dan menyalurkan setiap aspirasi serta pendapat masyarakat, tujuannya untuk mengurangi kesenjangan. Di zaman sekarang ini pendapat yang sama sangat dibutuhkan di dalam sebuah tatanan masyarakat, hal ini diyakini agar pendapat setiap orang dapat ditampung dan tidak menghilang begitu saja layaknya suara orang ditengah padang yang luas. Penampungan pendapat yang diproses inilah yang dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Ketika disatukan, aspirasi tersebut dapat diolah dalam keadaan yang lebih beraturan, proses inilah yang disebut “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

Supaya tuntutan dan pendapat masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah, setiap partai politik berhak melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan ini dapat dicantumkan kedalam rencana partai agar dapat diperjuangkan serta tersampaikan, hal ini dimaksudkan untuk mendapat kebijaksanaan daripada pemerintah itu sendiri, yang kemudian hal ini bisa disebut sebagai *public policy*. Adapun fungsi lain daripada partai politik adalah menjadi alat untuk menyebarkan rencana (*planning*) pemerintah hingga mencakup

kebijaksanaanya. Hal ini diharapkan agar pemerintah lebih terbuka kepada warga negaranya karena partai politik mampu menjadi penghubung antara kedua belah pihak yang disebut. Partai politik bisa dijadikan pengeras suara bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan bisa menjadi alat pendengaran yang bagus terhadap pemerintah, inilah fungsi lain dari partai politik, kita dapat menyebutnya seperti perantara dalam sebuah gagasan.⁵⁷

b. Partai Politik mampu dijadikan alat sosialisasi

Partai adalah organisasi politik yang mampu dijadikan sebagai alat sosialisasi (*instrument of political socialization*). Sosialisasi yang dimaksud adalah fenomena politik dalam sebuah tatanan ilmu (*political knowledge*) yang memiliki arti bahwa suatu proses pengenalan harus diterapkan kepada masyarakat dimanapun mereka berada dalam sebuah nama. Pengenalan tersebut harus berjalan secara bertahap, maksudnya adalah bahwa sosialisasi politik terjadi pada semua masa (anak-anak sampai tua). Selain daripada itu, sosialisasi politik meliputi berbagai tahapan di dalam tatanan masyarakat karena setiap generasi berhak mengerti pengajaran nilai dan norma.

Penjelasan yang lain adalah, bahwa untuk meningkatkan kesadaran politik yang lebih baik maka sebuah partai dapat dijadikan sarana untuk mendidik setiap anggotanya, tujuan

⁵⁷ Meriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*

sosialisasi ini digunakan untuk pemahaman terhadap solidaritas partai dan kepentingan nasional serta bertanggung jawab sebagai insan manusia.

Penerapan sosialisasi politik dapat dilakukan melalui kursus penataran, kursus kader, serta ceramah dan lain-lain.

c. Partai politik dapat menjadi instrumen perekrutan.

Parpolpun memiliki peran untuk merekrut serta menggaet orang-orang bertalenta agar dapat berperan pada semua kegiatan politik, bertransformasi menjadi anggota partai (*political recruitment*). Oleh karenanya partai dapat meluaskan sasaran rekrutan anggota politiknya. Cara paling ampuh ialah melewati kontak personal, dan lain sebagainya. Juga diharapkan agar merekrut anak-anak muda supaya dididik bertransformasi ke kader yang di masa akan datang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya (*selection of leadership*)⁵⁸.

4. Partai politik untuk mengatur konflik (*conflice management*).

Dalam keadaan demokrasi, persaingan serta silang pendapat pada masyarakat ialah soalan yang lumrah. Bila hal itu bisa menjadikan sebuah konflik, parpol harus berupaya agar bisa mengatasi itu.

Pada penerapan politik dapat dipandang bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak diaplikasikan sesuai yang diinginkan. Contohnya berita yang disebarkan malah membuat keresahan dan propaganda dalam masyarakat; yang dicari bukanlah kepentingan nasional

⁵⁸ *Ibid.*, h.164

melainkan kepentingan partai yang sempit dengan konsekuensi pengkotakan politik, dengan demikian konflik malah tidak selesai.

Efek seperti ini di wilayah negara-negara baru bisa memunculkan kecaman terhadap sistem kepartaian itu dengan mengikat berbagai macam akibatnya: adapun beberapa negara banyak partai yang dibubarkan (Pakistan, tahun 1958, walau akhirnya terpaksa dibentuk lagi); ada Negara yang hanya membolehkan sistem satu partai (beberapa negara Afrika); adapula Negara yang membatasi pergerakan partai.⁵⁹

C. Bentuk Pemikiran Anggota Partai Politik

Pemikiran ialah sebutan untuk istilah yang bergantung kepada pengelihatan (proses kegiatan mental maupun hasilnya) seseorang berkenaan dengan universalitas, metafisika dan epistemologi dengan memakai sebuah interaksi batinnya yang memakai ide-ide acak yang bukan rekaan sekalipun, yang mempunyai kevalidan murni untuk menciptakann gagasan *general*.⁶⁰ Setiap anggota partai harus mempunyai pemikiran yang mumpuni dan layak untuk mengkoordinir berbagai kegiatan dan terjun keranah politik sehingga dapat digunakan untuk mempengaruhi pendukungnya dan masyarakat banyak.

Anggota partai politik wajib mematuhi aturan dari pemimpin dan atasan termasuk aturan yang termuat di dalam AD/ART partai, anggota

⁵⁹ *Ibid.*, h.165

⁶⁰ Izomiddin *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*

partai politik akan diberikan sanksi yang tegas apabila melanggar kode etik yang telah disepakati secara final.⁶¹

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah pedoman untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut dipakai agar dapat dibandingkan dari hasil penelitian tertera. Adapun diantara penelitian tesebelumnya yang menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian disebut diantaranya.

Tabel 1

Penelitian Rani Dwi Yulianti

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator Atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Rani Dwi Yulianti (2018) dengan judul “Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia (Studi Keberhasilan Lolos Verifikasi	Untuk mengetahui strategi sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia kepada kaum muda Indonesia dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Partai Solidaritas Indonesia dalam	Metode Analisis Kualitatif	PSI berhasil menarik minat kaum muda Indonesia untuk bergabung menjadi anggota dengan menggunakan strategi sosialisasi komunikasi tatap muka (<i>face to face</i>), dan tepat sasaran. Faktor pendukung dalam strategi sosialisasi PSI kepada kaum muda Indonesia adalah adanya keterlibatan tokoh-tokoh muda PSI, adanya pembentukan tim-tim dan Faktor penghambatnya adalah banyaknya partai

⁶¹ Anggota Partai memang diharuskan taat terhadap pemimpin partainya dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di dalam aturan partai tersebut.

Faktual)”	melakukan strategi sosialisasi kepada kaum muda Indonesia.		politik baru yang ikut bersaing, keterbatasan tenaga dan dana dan yang mensosialisasikan kurang menguasai lapangan.
-----------	--	--	---

Sumber: Rani Dwi Yuliati, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018

Tabel 2

Penelitian Dara Atika

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator Atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Dara Atika (2019) dengan judul “Strategi Pemasaran Partai Politik Baru Dalam Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung 2019 (Studi Pada Partai Perindo, PSI, Berkarya dan Garuda	Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan partai politik baru di dalam pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung 2019 ditengah banyaknya partai politik lama	Metode deskriptif kualitatif	Partai Perindo memiliki target segmen kepada masyarakat menengah ke bawah serta memiliki <i>image</i> kesejahteraan masyarakat dan menggunakan media televisi dalam mensosialisasikan program dan partai. PSI lebih mengarah kepada kalangan milenial dan kaum perempuan dan melakukan sosialisasi secara <i>door to door</i> untuk memperkenalkan partainya. Target segmen partai Berkarya adalah seluruh kalangan dan golongan masyarakat serta Partai Berkarya membawa dan mensosialisasikan nilai serta program orde baru kepada masyarakat dan memiliki <i>image</i> bapak soeharto. Target segmen partai Garuda adalah kalangan menengah

			kebawah serta tidak menggunakan tokoh sentra dalam partai.
--	--	--	--

Sumber: Dara Atika, Skripsi, Universitas Lampung, 2019

Keterangan:

1. *Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani Dwi Yulianti*

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani Dwi Yulianti yakni sama-sama meneliti tentang Partai Solidaritas Indonesia dimana fokus pembahasannya kepada anggota partainya dengan analisis kualitatif.

Perbedaannya adalah, peneliti menggunakan penelitian pustaka dan terfokus pada pemikiran politik. Pembahasannya mencakup seluruh anggota partai yang sudah terekrut baik yang muda, dewasa, ataupun yang tua, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan penelitian lapangan serta menggunakan strategi politiknya untuk merekrut anak mudanya saja, adapun peneliti peneliti Hukum dalam Islam sedangkan peneliti sebelumnya tidak memakai Hukum dalam Islam.

2. *Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dara Atika*

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Atika ialah sama-sama meneliti perkara partai politik dan memfokuskan kepada kaum perempuan, dengan analisis kualitatif.

Perbedaanya adalah, peneliti hanya membahas pemikiran politik pada satu partai yakni Partai Solidaritas Indonesia di DPP Pusat sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pemasaran partai politik baru dalam pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan Hukum Islam dengan kajian pustaka sedang peneliti terdahulu tidak menggunakan Hukum Islam dengan kajian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non muslim*, Penerjemah Abdillah Obid, Jakarta: Bestari Buana Murni
- Amirudin Dan Asikin, Zainal Arifin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Anwar, Dessy. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed.) Cet.4 Jakarta: Rinneka Cipta
- Bakhsh, Khuda. 1998. *Politics in Islam*, Delhi: Idarah-I Delli
- Budiardjo, Meriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik "Konsep Teori, dan Strategi"*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dhaif, Syauqi. 2011. *Almu' jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Firmanzah. 2008 *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Galib, Muhammad. 1998 *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina
- Garnadi. 1984. dari *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islambad: Islamic Research Institute Pakistan. 1970. Penerbit PUSTAKA ITB
- Hamka. 2002. *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial Budaya, Politik*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan

- Hasan,Ahmad . 1970. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terjemahan oleh Agah Imarah,Muhammad. 1998. *Ma'rakatul Mushthalah at baina al-Gharbi wal Islami*, Kairo: Nahdhah Mishr
- Izomiddin. 2008. *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Ma'luf,Abu Lowis. 1973. *Al-Munjid*, Bairut: Daar al-Masyreq
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup
- M. Hikmat,Mahi. 2011. *Komunikasi Politik*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Moh, E. Hasim. 1987. *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka
- Nurbuko,Cholid dan Ahmadi,Abu. 1997. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pamungkas
- Qadir,Abdul bin Thair al-Baghdadi. 1973. *al-Faraqbayna al-Firaq*, Beirut: Da'ar al-Fikr
- Ramadhan,Said. 1991. *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Jakarta: Firdaus
- R.H Soltau dalam Meriam Budiarmo. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Sya'ban,Zakiyuddin. 1964. *Ushul Fiqh al-Islami*, Mesir:Dar al-Ta'lif
- Syafiie,Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*, Jakarta: RinekaCipta
- Syarif, Mujar Ibnu. 2010. *Presiden non Muslim di Negara Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Shihab,Quraish. 2002. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- Sholihin,Bunyana. 2015. *Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* Yogyakarta: Institute for Democracy and welfarism
- Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung

Taimiyah,Ibnu. 2007. *Syarhu Kitab al-Siyasati al-Syar'iyah*, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar

Thaib,Lukman. 1998. *Politik Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn Bhd

Tim PSI. 2015. *ABC Partai Solidaritas Indonesia*, Jakarta: DPP PSI

Sumber Jurnal:

Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.III

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa: *Tafsir Al-Maraghi*

Arskal Salim, *Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM*, Jurnal Perempuan No. 60 Cet I, (Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan, 2008)

Aziz Dahlan,Abdul *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), Vol.3

EvraWillya. 2009. *Al-Hurriyah*, Vol. 10 No.1, Januari-Juni

Hadis yang ditarjihkan oleh Al-Daruquthni, juz2

Jani Arni: *Hizbullah dan Hizbussyaithan dalam Al-Qur'an*

Khalik,Abu tholib 2014, "*Pemimpin Non muslim Perspektif Ibnu Taimiyyah*", Jurnal Studi Keislaman, Volume 14 Nol

Mazahib: Hayatun Na'umah dan Bahjatul Mardhiah, *Perda Berbasis Syari'ah* , Vol. XV, No. 2 Desember 2016

M.Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an IX Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.d. Permulaan al'Azhab*

Willya, Evra *Al-Hurriyah*, Vol.X

Tafsir fi Zhilail-Qur'an IX Juz XXI: Akhir al-'Ankabuut s.d Permulaan al'Azhab

Sumber Hukum:

LihatPasal 41 s/d Pasal 44 PP No.9 Tahun 1975

Rincian dari AD/ART PSI

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sumber Internet:

<https://m.detik.com/news/berita/d-4358624/sikap-psi-yang-kontroversi-tolak-perda-agama-instruksi-ucapan-natal>

<https://m.merdeka.com/grace-natalie/profil/>

<https://youtu.be/bTNYhRX--gA>

https://youtu.be/limz_AOEhg0

<https://youtu.be/H4A-PeuFNzw>

<https://youtu.be/xYFrDMwKrcY>

<https://youtu.be/bTNYhRX--gA>